

ABSTRAK

Tanggung Jawab Penulis Buku Dan Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Peredaran Buku Dengan Isi/Konten Yang Menyesatkan Pembaca Dikaitkan Dengan Undang Undang Hak Cipta Dan Undang Undang Perlindungan Konsumen

**Winade Yehezkiel
(1187067)**

Kegiatan menulis merupakan bentuk perwujudan kehendak bebas penulis yang dituangkan ke dalam tulisan. Hasil tulisan yang paling banyak ditemui adalah buku. Pada perkembangannya terdapat buku menyesatkan yang beredar di masyarakat. Hal ini menimbulkan pertentangan antara kebebasan menulis dan peredaran buku yang menyesatkan pembaca. Untuk itu penulis buku dituntut bertanggung jawab terhadap buku tersebut. Berkaitan dengan peredaran buku yang menyesatkan, pemerintah memiliki peran dalam mengawasi peredaran buku menyesatkan.

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Jenis data sekunder yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, seperti perundang-undangan yang terkait di dalam penulisan buku, yaitu : UU Sistem Perbukuan, UUPK, UUHC. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti literatur buku tentang Hak Cipta, Perlindungan Konsumen, dan Peredaran Buku. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan, yang ada pada artikel dan laman-laman elektronik mengenai kontrak penerbitan buku.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab penulis buku terhadap peredaran buku yang menyesatkan terbagi atas 2 (dua) unsur, yakni Undang-Undang dan Perjanjian. Konsep pertanggungjawaban penulis terbagi atas 2 (dua), yakni *Strict Liability* dan *based on fault liability*. Pertanggungjawaban penulis buku terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu pertanggungjawaban pribadi, pertanggungjawaban penulis dalam hal korporasi dan tanggung jawab renteng para pihak penerbitan buku. Terdapatnya klausul “isi diluar tanggung jawab penerbit”, merupakan tanggung jawab renteng para pihak. bagi penulis, beban pertanggungjawaban timbul secara pribadi. Penerbit dikenai beban pertanggungjawaban karena memiliki tanggung jawab korporasi dan renteng. Percetakan memiliki bentuk tanggung jawab secara korporasi dan renteng. Oleh karena itu, pertanggung jawaban para pihak (penulis dan penerbit) terhadap klausul mengenai pengalihan tanggung jawab merupakan tanggung jawab dalam bentuk renteng atau bersama-sama.

Peran pemerintah dalam mengawasi peredaran buku menyesatkan terbagi atas 2 (dua), yakni sebagai pembina dan sebagai pengawas. Sebagai pembina dikoordinir oleh Menteri dan Menteri terkait. Sedangkan sebagai pengawas diwakili oleh Pihak Kepolisian beserta dengan PPNS sebagai aparaturnegara.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Buku Menyesatkan, Penulis, Para pihak, Pemerintah.

ABSTRAK

THE LIABILITY OF THE BOOK WRITER OF AND ROLE OF GOVERNMENT IN ON THE BOOK WITH THE CONTENTS OF / CONTENT WORD THAT MISLEAD THE READER ASSOCIATED WITH THE CONSTITUTION COPYRIGHT AND THE CONSTITUTION CONSUMER PROTECTION

**Winade Yehezkiel
(1187067)**

Activities writing is a form of a free will writer who is poured into in writing .The results of writing the most common was the. In progress there are book astray circulating in the community .This creates the difference between freedom writing and distribution book astray. For that the writer of be held responsible to the book. Pertaining for the book astray, the government has a significant role in supervising distribution book astray.

Types of data on secondary used, namely material law primary, as legislation related on in writing book, namely: the system of books act, UUPK , UUHC. The secondary material law used like literature book on copyright, consumer protection, and distribution book. The Material law tertiary who writers use, that is on an article and electronic website about contract the book.

The research obtained the conclusion that the liability of the writer on the book astray divided into 2 (two) element, namely laws and agreement. The concept of accountability writer divided into 2 (two), the strict liability and based on fault liability. Accountability the author of divided into 3 (three) the form of, namely personal accountability, accountability writer in terms of corporate and liability themselves the parties the book.

Came across clause "the contents of out publisher liability", is the liability of themselves the parties. For writer, burden accountability arising personally. Publisher charged with burden accountability because it has corporate liability of and themselves. Printing having the form of liability to the corporate and themselves. Hence, purpose answer the parties on clause about diversion liability is the liability of in the form of themselves.

The role of governments in supervising distribution book astray divided into 2 (two), which as trustees and as a supervisory. As trustees coordinated by minister and related minister .While as a supervisory represented by the police along with PPNS as state apparatus.

Kata kunci : Liability, The book astray, Writer, Parties, Government.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....	iii
PERSETUJUAN REVISI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Kegunaan Penulisan.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI STATUS DAN KEDUDUKAN PENULIS BUKU, PERAN PEMERINTAH DALAM PEREDARAN BUKU, SISTEM PEREDARAN BUKU DI INDONESIA.....	24
A. Tinjauan Umum Mengenai Status dan Kedudukan Penulis Buku....	24
1. Pendefinisian Penulis menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	24

2. Tinjauan Umum Mengenai Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Buku.....	26
3. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Penerbitan Buku.....	33
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Penerbitan Buku.....	38
1. Pengertian perjanjian Penerbitan Buku.....	38
2. Perjanjian penerbitan buku dibuat tertulis.....	38
3. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	40
4. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	44
5. Perikatan para pihak dalam perjanjian.....	47
C. Perlindungan Konsumen Bagi Pembaca.....	48
1. Pengertian, Hak dan Kewajiban Konsumen.....	48
2. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	51
3. Pendefinisian, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	53
4. Asas Perlindungan Konsumen.....	55
 BAB III PEREDARAN BUKU DI INDONESIA DAN ISI/KONTEN BUKU YANG MENYESATKAN PEMBACA.....	 57
A. Deskripsi mengenai Sistem Perbukuan Di Indonesia.....	57
1. Pendefinisian Buku dan Jenis Buku.....	57
2. Proses Penciptaan dan Penulisan Buku.....	62
3. Perlindungan Hukum Terhadap Buku.....	65
4. Asas Dan Tujuan Sistem Perbukuan.....	67

B. Sistem Peredaran Buku Di Indonesia.....	71
1. Syarat Penerbitan Buku.....	72
2. Proses Penerbitan Buku Pada Umumnya.....	74
3. Peredaran Buku Di Indonesia.....	79
4. Buku Bohong Dan Buku Sesat Dalam Peredaran Buku Sesat di Indonesia.....	84

**BAB IV ANALISA TERHADAP TANGGUNG JAWAB
PENULIS BUKU DAN PERAN PEMERINTAH DALAM
MENGAWASI PEREDARAN BUKU DENGAN ISI/KONTEN
YANG MENYESATKAN PEMBACA DIKAITKAN DENGAN
UNDANG UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG UNDANG
PERLINDUNGAN.....** **87**

A. Tanggung Jawab Penulis Buku Dalam Hal Penerbitan Buku....	87
1. Tanggung Jawab Penulis Dalam Hal Penerbitan Buku Menurut Undang-Undang.....	87
a. Tanggung Jawab Penulis Dalam Hal Penerbitan Buku Menurut Undang-Undang Sistem Perbukuan.....	88
b. Tanggung Jawab Penulis Dalam Hal Penerbitan Buku Menurut Undang-Undang Hak Cipta.....	113
2. Tanggung jawab Penulis Dalam Hal Penerbitan Buku Menurut Perjanjian.....	126
B. Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Peredaran Buku Dengan Isi/Konten Yang Menyesatkan Pembaca.....	139

1. Peran Pemerintah Sebagai Pembina Terhadap Peredaran Buku Sesat.....	139
2. Peran Pemerintah Sebagai Pengawas Terhadap Peredaran Buku Sesat.....	143
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	148
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA.....	154

